

ABSTRAK

Nicka Saputri Adi Pertiwi (2021) : “Kepatuhan Wajib Pajak Rumah Kos Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2017-2019 (Studi Kasus Kota Bandung).”

Demi menyelenggarakan pemerintahan yang lebih baik, pemerintah memberikan kewenangan kepada suatu daerah untuk mengurus daerahnya masing-masing termasuk mengurusi pendapatan daerah tersebut. Pendapatan daerah yang berpotensi untuk digali ialah bersumber dari pajak. Berkaitan dengan pajak daerah, Kota Bandung menjadi kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Barat dan sekaligus menjadi Ibu Kota Provinsi Jawa Barat. Dengan begitu, terdapat potensi sumber daya untuk digali salah satunya yang cukup besar adalah pajak rumah kos.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketepatan waktu wajib pajak rumah kos di Kota Bandung, untuk mengetahui penghasilan wajib pajak rumah kos di Kota Bandung, untuk mengetahui pengenaan sanksi wajib pajak rumah kos di Kota Bandung, dan yang terakhir untuk mengetahui pembayaran & pembukuan wajib pajak rumah kos di Kota Bandung.

Peneliti dalam meneliti mengenai Kepatuhan Wajib Pajak Rumah Kos Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 207-2019 Studi Kasus Kota Bandung, menggunakan teori dari (Simanjuntak & Mukhlis, 2012). Dalam teori tersebut menjelaskan bahwa untuk mengukur kepatuhan wajib pajak dilihat dari indikator yaitu dari aspek Ketepatan Waktu, Penghasilan WP, Pengenaan Sanksi, Pembayaran dan Pembukuan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Alasan peneliti menggunakan metode dan pendekatan tersebut adalah karena ingin memahami secara mendalam dengan kasus yang terjadi yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumen kualitatif, dan materi audio & visual. Sementara teknik analisis data yaitu mempersiapkan data, membaca keseluruhan data, memulai coding, menerapkan coding, penyajian, dan interpretasi data.

Kesimpulan penelitian yang pertama ketepatan waktu wajib pajak rumah kos Kota Bandung yang belum optimal, kedua penghasilan wajib pajak rumah Kos Bandung yang dinilai sudah optimal karena sudah bersedia dan mengetahui penghasilan kena pajaknya, ketiga pengenaan sanksi wajib pajak rumah kos Kota Bandung yang belum optimal sepenuhnya karena sanksi yang diberikan kepada wajib pajak belum menyeluruh, keempat pembayaran dan pembukuan yang sudah cukup baik.

Kata kunci: Pajak Daerah, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Rumah Kos.

ABSTRACT

Nicka Saputri Adi Pertiwi (2021) : “Boarding House Taxpayer Compliance With Regional Revenue Management Agency In 2017-2019 (Case Study of Bandung City).”

In order to organize a better government, the government gives authority to a region to manage their respective regions, including managing the regional income. Regional income that has the potential to be extracted is sourced from taxes. With regard to local taxes, the City of Bandung is the largest metropolitan city in West Java Province and at the same time the capital city of West Java Province. That way, there is potential for resources to be explored, one of which is quite large, the boarding house tax

The purpose of this study was to determine how the compliance of home taxpayers in the city of Bandung in terms of the dimensions that the researchers used, namely to determine the timeliness of the taxpayers of boarding houses in the city of Bandung, to determine the income of the taxpayers of boarding houses in the city of Bandung, to determine the imposition of mandatory sanctions. boarding house tax in the city of Bandung, and the last is to find out the payment & bookkeeping of the boarding house tax payer in the city of Bandung.

To examine research on Boarding House Taxpayer Compliance at the Regional Revenue Management Agency in the Year 207-2019 Case Study of the City of Bandung, researchers used the theory of (Simanjuntak & Mukhlis, 2012). The theory explains that measuring taxpayer compliance can be seen from the indicators, namely from the aspects of Timeliness, Taxpayer Income, Imposition of Sanctions, Payments and Bookkeeping.

This study uses a qualitative research method with a case study approach. The reason the researcher uses these methods and approaches is because they want to understand in depth the cases that occur which are the problems in this study. Data collection techniques were carried out by means of observation, interviews, qualitative documents, and audio & visual materials. While the data analysis techniques are preparing the data, reading the entire data, starting coding, applying coding, presenting, and interpreting the data.

The conclusions of the research are the first timeliness of the Bandung City boarding house taxpayers which is not optimal, the second Bandung boarding house taxpayers' income which is considered optimal because they are willing and know their taxable income, the third is the imposition of Bandung boarding house taxpayer sanctions which are not fully optimal because the sanctions given to taxpayers have not been comprehensive, the four payments and bookkeeping are quite good.

Keywords: Local Tax, Taxpayer Compliance, Boarding House Tax.